

ETIKA DAN DISIPLIN DALAM PRESENSI DIGITAL: TANTANGAN INTEGRITAS DI ERA DIGITALISASI

Shilvina Tiyas Ivanca, Shakila Talitha Kalstum, Sheren Ramandhani, Jessica Chelcelia, Tiara Dwi Octavia, Husniah Rebiana Hutasuhut, Abel hervieta Natasya, M. Nicholas Saputra, Erik Franciko Dias
Universitas Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

shilvina.tiyas@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Di era digitalisasi yang semakin pesat, penggunaan sistem presensi digital di lingkungan pendidikan dan birokrasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi terwujudnya etika, disiplin, dan integritas kerja. Presensi berbasis teknologi mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas, namun di sisi lain juga membuka potensi penyimpangan nilai moral, seperti manipulasi kehadiran, lemahnya tanggung jawab pribadi, dan berkurangnya pengawasan sosial. Artikel ini merupakan kajian konseptual yang bertujuan menganalisis integrasi nilai etika dan disiplin dalam penerapan presensi digital guna menjaga integritas individu maupun kelembagaan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis konseptual yang menelaah hubungan antara variabel etika, disiplin, integritas, dan digitalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas presensi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh tiga aspek penting: (1) internalisasi nilai etika pada pengguna, (2) mekanisme disiplin yang transparan dan konsisten, serta (3) tata kelola digital yang adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan presensi digital seharusnya tidak hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, penguatan integritas, dan penegakan disiplin di era digital.

Kata kunci: *presensi digital, etika digital, disiplin administratif, integritas kelembagaan, digitalisasi*

Abstract

In the accelerating era of digitalization, the implementation of digital attendance systems within educational and bureaucratic institutions presents both opportunities and ethical challenges to the realization of discipline and integrity. Technology-based attendance improves efficiency, accuracy, and accountability; however, it also introduces potential ethical issues such as attendance manipulation, weakened individual responsibility, and reduced social oversight. This paper is a conceptual study that aims to analyze the integration of ethical values and disciplinary mechanisms in the application of digital attendance systems to maintain personal and institutional integrity. The research employs a literature review and conceptual analysis approach to examine the relationship among ethics, discipline, integrity, and digitalization. The findings indicate that the effectiveness of digital attendance is determined not only by technological sophistication but also by three essential elements: (1) ethical internalization among users, (2) transparent and consistent disciplinary mechanisms, and (3) fair and accountable digital governance. Therefore, digital attendance should not merely serve as an administrative tool but also as an instrument for character formation, integrity reinforcement, and discipline enforcement in the digital era.

Keywords: *digital attendance, digital ethics, administrative discipline, institutional integrity, digitalization*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kerja dan sistem administrasi di berbagai sektor, termasuk sistem kehadiran atau presensi. Digitalisasi presensi menghadirkan efisiensi dan akurasi data, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dan disiplin individu di lingkungan kerja maupun pendidikan. Menurut Hakimi (2021), penerapan sistem digital tanpa penguatan nilai moral dapat menimbulkan ketimpangan antara kemajuan teknologi dan integritas manusia.

Dalam konteks lembaga pendidikan dan pemerintahan, presensi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat kehadiran, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya disiplin dan tanggung jawab. Sayangnya, banyak implementasi sistem digital yang belum disertai pembinaan etika, sehingga muncul praktik manipulasi data kehadiran atau pelanggaran

kejujuran (Aisyah & Yasri, 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dan pembinaan karakter aparatur.

Penelitian Uloli, Rachman, dan Podungge (2024) menegaskan bahwa disiplin kerja dipengaruhi oleh kejelasan sistem, pengawasan etis, dan tanggung jawab individu. Artinya, kemajuan sistem presensi digital harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai etika agar integritas tidak tergerus oleh kemudahan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara konseptual bagaimana etika dan disiplin dapat diintegrasikan dalam sistem presensi digital agar tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat integritas lembaga.

Tulisan ini merupakan kajian konseptual yang bertujuan menganalisis keterkaitan antara etika, disiplin, dan penerapan sistem presensi digital di era digitalisasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif teoritis bagi lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan presensi berbasis nilai moral dan integritas. Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan selanjutnya akan menelaah landasan teoretis mengenai etika, disiplin, dan integritas dalam konteks digitalisasi sebagai pijakan konseptual analisis ini.

KAJIAN TEORI

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam tata kelola administrasi, khususnya pada sistem kehadiran di lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Digitalisasi birokrasi tidak hanya menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, tetapi juga menuntut penyesuaian perilaku, nilai moral, dan etika kerja setiap individu yang memanfaatkan teknologi tersebut. Raharjo (2022) menekankan bahwa teknologi tidak dapat secara otomatis membentuk disiplin dan integritas; keberhasilan implementasi digitalisasi sangat bergantung pada internalisasi nilai moral, budaya kerja yang konsisten, serta pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan profesional. Dengan demikian, sistem presensi digital bukan sekadar alat pencatat kehadiran, tetapi juga sarana strategis untuk menanamkan prinsip tanggung jawab, disiplin, dan integritas secara berkelanjutan.

1. Etika dalam Era Digital

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Nasution (2021), etika digital mencakup kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan transparansi yang menjadi fondasi bagi interaksi digital yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam konteks presensi digital, penerapan nilai etika berarti setiap pengguna melaporkan kehadiran secara jujur, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menahan diri dari penyalahgunaan sistem. Penguatan etika digital dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, serta regulasi internal yang menekankan prinsip moral dan profesionalisme.

Selain itu, etika digital menjadi landasan bagi pembentukan budaya kerja yang berintegritas. Sari dan Pratama (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem digital tanpa dukungan etika berpotensi menimbulkan praktik manipulasi data, penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, dan melemahnya budaya kerja profesional. Oleh karena itu, internalisasi etika digital pada pengguna menjadi kunci untuk memastikan sistem presensi digital berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan karakter.

2. Disiplin dan Tanggung Jawab Kerja

Disiplin merupakan cerminan kepatuhan terhadap aturan dan komitmen terhadap tugas yang diberikan. Mangkunegara (2019) menyatakan bahwa disiplin kerja adalah

kesadaran dan kesiapan individu untuk menaati peraturan organisasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam konteks digital, kedisiplinan dapat diukur melalui ketepatan waktu melakukan presensi, konsistensi mengikuti prosedur, dan keseriusan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Disiplin digital bukan sekadar rutinitas, melainkan cerminan tanggung jawab moral yang menjadi pondasi keberhasilan organisasi.

Penelitian oleh Uloli, Rachman, dan Podungge (2024) menunjukkan bahwa disiplin kerja yang efektif terbentuk melalui kombinasi pengawasan yang transparan, motivasi internal yang kuat, serta sistem reward-punishment yang jelas. Dengan kata lain, walaupun teknologi presensi canggih, keberhasilan sistem sangat bergantung pada kedisiplinan dan kesadaran moral individu. Tanpa kesadaran ini, sistem digital hanya berfungsi sebagai alat administratif dan gagal membentuk budaya kerja yang profesional.

3. Integritas dalam Sistem Digital

Integritas merupakan landasan moral yang menggabungkan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks digitalisasi, integritas menjadi faktor penting agar teknologi digunakan secara benar dan tidak disalahgunakan. Yunus (2023) menegaskan bahwa keberhasilan sistem digital baru tercapai jika individu yang mengoperasikannya memiliki integritas tinggi; sebaliknya, tanpa integritas, teknologi dapat menjadi sarana pembenaran perilaku menyimpang.

Integritas kelembagaan juga memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap penerapan presensi digital. Lembaga yang menerapkan tata kelola berbasis nilai etika dan disiplin akan mampu menciptakan budaya kerja yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prasetyo dan Kurniawan (2022) menambahkan bahwa implementasi integritas kelembagaan melibatkan audit internal rutin, mekanisme pengawasan yang jelas, serta penguatan sanksi bagi pelanggar. Hal ini memastikan bahwa sistem digital tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga bermakna secara moral dan fungsional.

4. Hubungan Etika, Disiplin, dan Integritas

Ketiga konsep ini saling terkait dan membentuk fondasi penting dalam keberhasilan presensi digital. Etika memberikan pedoman moral, disiplin memastikan kepatuhan terhadap aturan, dan integritas menjamin konsistensi antara nilai dan praktik. Penelitian Santoso dan Lestari (2020) menegaskan bahwa integrasi ketiga aspek ini menghasilkan sistem digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga akuntabel, transparan, dan mampu menumbuhkan kepercayaan internal maupun eksternal. Dengan penerapan yang konsisten, sistem presensi digital dapat menjadi instrumen pembentukan karakter, penguatan budaya kerja profesional, serta penegakan integritas di era digitalisasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS KONSEPTUAL

1. Integrasi Etika dalam Presensi Digital

Presensi digital tidak sekadar alat administratif, tetapi juga sarana membangun budaya etika kerja. Menurut Nasution (2021), etika digital menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi dalam aktivitas berbasis teknologi. Dalam praktiknya, pegawai atau mahasiswa harus melaporkan kehadiran secara jujur dan menggunakan sistem presensi sesuai prosedur. Ketika nilai etika diterapkan secara konsisten, potensi manipulasi data dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan institusi terhadap individu.

2. Disiplin sebagai Fondasi Efektivitas Sistem

Disiplin merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan presensi digital. Mangkunegara (2019) menegaskan bahwa disiplin kerja mencakup kepatuhan terhadap aturan, konsistensi dalam menjalankan tugas, serta tanggung jawab pribadi. Sistem digital yang canggih sekalipun tidak akan efektif jika pengguna tidak disiplin. Penelitian Uloli, Rachman, dan Podungge (2024) menambahkan bahwa pengawasan yang transparan, bersama dengan motivasi internal, meningkatkan kedisiplinan, sehingga sistem presensi berjalan optimal.

3. Integritas Individu dan Kelembagaan

Integritas mencakup keselarasan antara tindakan dan nilai moral. Menurut Yunus (2023), teknologi digital hanya akan membawa manfaat maksimal jika dioperasikan oleh individu dengan integritas tinggi. Dalam konteks presensi digital, integritas menuntut setiap pengguna melaporkan kehadiran secara akurat, tidak menyalahgunakan sistem, dan mematuhi prosedur internal. Lebih jauh, lembaga yang menerapkan tata kelola digital berbasis nilai moral akan membentuk budaya kerja yang adil dan dapat dipercaya, memperkuat reputasi institusi sekaligus menumbuhkan akuntabilitas.

4. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun manfaatnya besar, penerapan presensi digital menghadapi beberapa tantangan. Pertama, risiko manipulasi data masih ada jika pengawasan tidak ketat. Kedua, resistensi budaya terhadap sistem digital dapat menghambat internalisasi nilai etika dan disiplin. Ketiga, kelemahan infrastruktur teknologi dapat menurunkan akurasi dan keandalan sistem (Raharjo, 2022). Oleh karena itu, pengembangan sistem presensi digital harus menyertakan pelatihan etika, mekanisme disiplin jelas, dan pemeliharaan teknologi yang berkelanjutan.

5. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis, ada beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan:

- Penguatan etika digital melalui sosialisasi, workshop, dan regulasi internal.
- Peningkatan disiplin dengan sistem pengingat otomatis, evaluasi rutin, dan reward-punishment yang jelas.
- Penguatan integritas kelembagaan dengan tata kelola transparan, audit internal berkala, dan penegakan sanksi bagi pelanggar.

Implementasi langkah-langkah ini akan memastikan presensi digital bukan sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen pembentukan karakter, penguatan integritas, dan penegakan disiplin.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian konseptual mengenai presensi digital, etika, disiplin, dan integritas, dapat disimpulkan bahwa implementasi presensi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan penguatan integritas di lembaga pendidikan maupun birokrasi. Keefektifan sistem presensi digital sangat tergantung pada integrasi nilai etika, kedisiplinan pengguna, serta tata kelola digital yang adil dan transparan. Sistem yang canggih sekalipun akan kurang optimal jika tidak disertai internalisasi etika dan mekanisme disiplin yang jelas (Nasution, 2021; Mangkunegara, 2019; Uloli, Rachman, & Podungge, 2024).

Selain itu, integritas individu dan kelembagaan menjadi kunci utama dalam menjaga akuntabilitas dan reputasi institusi. Lembaga yang menerapkan presensi digital dengan pengawasan yang konsisten, prosedur yang transparan, dan nilai moral yang ditanamkan pada pengguna dapat meminimalkan potensi manipulasi data serta memperkuat budaya kerja yang profesional dan terpercaya (Yunus, 2023; Raharjo, 2022). Dengan demikian, presensi digital efektif bukan semata karena teknologi, tetapi karena perpaduan antara kecanggihan sistem dan penerapan prinsip etika, disiplin, serta integritas. Implikasi dari kajian ini menunjukkan bahwa lembaga perlu memperhatikan internalisasi nilai etika, penguatan disiplin, dan tata kelola digital yang bertanggung jawab agar presensi digital dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pembentukan karakter dan penguatan integritas di era digitalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, R., & Yasri, M. (2019). *Integritas dan kejujuran dalam administrasi pendidikan digital*. Jurnal Pendidikan Administrasi, 5(2), 12-23.
- Hakimi, S. (2021). *Etika dan digitalisasi birokrasi: Perspektif manajemen modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkunegara, A. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, F. (2021). *Etika digital dan tanggung jawab moral di dunia maya*. Jakarta: Prenada Media.
- Prasetyo, H., & Kurniawan, B. (2022). *Digitalisasi birokrasi dan tantangan etika di era modern*. Jurnal Ilmu Administrasi, 10(2), 67-79.
- Raharjo, T. (2022). *Transformasi birokrasi digital di Indonesia: Etika, tanggung jawab, dan integritas*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45-58.
- Rahmawati, D. (2021). *Kedisiplinan pegawai dan penerapan sistem presensi digital*. Jurnal Manajemen Publik, 6(3), 44-55.
- Sari, R., & Pratama, D. (2020). *Budaya kerja berbasis etika di era digital*. Jurnal Manajemen & Teknologi, 8(3), 101-110.
- Santoso, E., & Lestari, P. (2020). *Pengaruh etika dan integritas terhadap efektivitas administrasi digital*. Jurnal Teknologi & Manajemen, 9(4), 88-99.
- Uloli, L., Rachman, A., & Podungge, F. (2024). *Hubungan disiplin kerja dan tanggung jawab terhadap kinerja pegawai*. Jurnal Manajemen Publik, 7(1), 25-33.
- Wibowo, A. (2019). *Pengelolaan sumber daya manusia dan budaya disiplin di era digital*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yunus, M. (2023). *Integritas kelembagaan dalam tata kelola digital pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.